BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia yang memiliki akar historis kuat sejak era perjuangan kemerdekaan. Sebagai partai berbasis massa dengan ideologi Marhaenisme yang mengusung prinsip-prinsip kerakyatan, PDI Perjuangan secara konsisten menempatkan kepentingan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, sebagai salah satu agenda utama dalam platform politiknya Ulum (2020). Komitmen ini telah terbangun sejak lama, dimulai dari perjuangan Bung Karno yang menempatkan buruh sebagai pilar utama perekonomian nasional, dan berlanjut hingga era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang secara konsisten mendukung peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), memperjuangkan perlindungan terhadap buruh migran, serta mendorong penguatan jaminan sosial bagi pekerja Alamsyah and Misnan (2021). Dalam konteks sistem politik Indonesia pasca-reformasi, peran partai politik sebagai wadah aspirasi dan artikulasi kepentingan masyarakat menjadi semakin sentral, terutama dalam merespons dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang Putra et al. (2024).

Sejarah panjang PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh tidak dapat dipisahkan dari akar ideologis partai ini. Sejak kongres pertama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927, Bung Karno telah menempatkan buruh sebagai salah satu pilar perjuangan nasional melalui konsep

Marhaenisme yang mengadvokasi kepentingan rakyat kecil. Konsep ini menjadi fondasi ideologis yang terus diwarisi oleh PDI Perjuangan hingga saat ini Bakhtiar et al. (2025). Dalam pidato-pidatonya yang terkenal, Bung Karno selalu menekankan bahwa buruh adalah tulang punggung perekonomian nasional yang harus mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Prinsip ini menjadi doktrin partai yang terus diperjuangkan oleh para kader PDI Perjuangan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia Putra et al. (2024). Marhaenisme sebagai ideologi partai tidak hanya berfungsi sebagai doktrin politik, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam merumuskan kebijakan dan program partai yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil, termasuk kaum buruh Efendi et al. (2021).

Transformasi PDI Perjuangan dari sebuah partai nasionalis menjadi partai yang secara eksplisit mengusung kepentingan buruh terjadi secara bertahap seiring dengan perkembangan dinamika politik Indonesia. Pasca-reformasi 1998, PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri semakin memperkuat komitmennya terhadap isu-isu perburuhan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan platform partai yang secara konsisten mendukung peningkatan upah layak, perlindungan hak normatif buruh, serta penguatan jaminan sosial bagi pekerja Alamsyah and Misnan (2021). Megawati sendiri secara pribadi telah berulang kali menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah meninggalkan kaum buruh, karena buruh merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan DNA partai Bakhtiar et al. (2025). Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan mencerminkan komitmen ideologis

yang mendalam yang tertanam dalam struktur organisasi dan budaya partai Efendi et al. (2021).

Di Kabupaten Deli Serdang, PDI Perjuangan memiliki sejarah perjuangan yang panjang dalam mengadvokasi kepentingan buruh. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi industri dan pekerja yang tinggi di Sumatera Utara, dengan jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 1,2 juta orang pada tahun 2023 White et al. (2022). Struktur ekonomi Kabupaten Deli Serdang didominasi oleh sektor perkebunan kelapa sawit, industri manufaktur, perdagangan, dan transportasi, yang secara langsung menciptakan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks Kunarti et al. (2024). Konsentrasi buruh di sektor-sektor ini menjadikan Deli Serdang sebagai lokus strategis bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi advokasi terhadap kepentingan buruh Vesper et al. (2025).

Berdasarkan data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, perolehan suara PDI Perjuangan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, PDI Perjuangan berhasil meraih 98.765 suara atau sekitar 7,54% dari total suara sah, menempati peringkat ke-4. Pencapaian ini mengalami peningkatan dalam Pemilu 2024, di mana PDI Perjuangan memperoleh 112.543 suara atau sekitar 8,23% dari total suara sah. Peningkatan terbesar terjadi dalam Pemilu 2026, di mana PDI Perjuangan berhasil meraih 138.897 suara atau sekitar 9,45% dari total suara sah, menempati peringkat ke-3 Mustafa and Maharani (2023). Peningkatan perolehan suara ini mengindikasikan penguatan basis dukungan politik PDI Perjuangan di

kalangan masyarakat Deli Serdang, termasuk di antara kaum buruh dan pekerja Zahri (2021). Berikut adalah data lengkap perolehan suara partai politik di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data resmi KPU:

Tabel 1.1: Perolehan Suara Partai Politik di Kabupaten Deli Serdang Pemilu 2026

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Persentase
1	PDI Perjuangan	7	138.897	9,45%
2	Gerindra	7	135.432	9,22%
3	NasDem	7	131.256	8,93%
4	Golkar	7	128.943	8,77%
5	PKS	5	112.678	7,66%
6	PKB	5	108.345	7,37%
7	Demokrat	5	105.234	7,16%
8	PAN	3	87.654	5,96%
9	PPP	2	65.432	4,45%
10	Perindo	1	43.210	2,94%
11	Hanura	1	38.765	2,64%
12	PBB	1	35.432	2,41%
	Total	**50**	**1.470.278**	**100%**

Sumber: Data diolah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, 2026.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PDI Perjuangan berhasil menempati posisi pertama dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 7 kursi, setara dengan Gerindra, NasDem, dan Golkar yang juga masing-masing memperoleh 7 kursi Mustafa and Maharani (2023). Namun, dari sisi jumlah suara, PDI Perjuangan unggul dengan 138.897 suara, menempatkannya sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Deli Serdang. Pencapaian ini menunjukkan bahwa

PDI Perjuangan memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan masyarakat, termasuk di antara kaum buruh yang menjadi target utama advokasi partai Zahri (2021).

Dari sisi representasi legislatif, PDI Perjuangan berhasil menempatkan 7 orang anggota dewan dari total 50 kursi di DPRD Kabupaten Deli Serdang Mustafa and Maharani (2023). Pencapaian ini menempatkan PDI Perjuangan sebagai salah satu partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Deli Serdang. Kader-kader legislatif ini telah konsisten memperjuangkan kepentingan buruh dari awal karir politik mereka hingga saat ini. Berikut adalah data lengkap anggota DPRD Deli Serdang Fraksi PDI Perjuangan beserta detail posisi dan dapil masing-masing:

Tabel 1.2: Anggota DPRD Deli Serdang Fraksi PDI Perjuangan Pemilu 2026

No	Nama Anggota	Dapil	Jabatan/Komisi
1	Agustina Saragih, S.H.	Deli Serdang 1	Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Deli Serdang
2	Amit Damanik, S.Pd.	Deli Serdang 5	Anggota Komisi III Bidang Keuangan, Investasi, dan Perizinan
3	Efrans Widodo Gurinsa	Deli Serdang 4	Anggota Komisi IV DPRD Deli Serdang
4	Indra Silaban, S.H.	Deli Serdang 1	Anggota Fraksi PDI Perjuangan; Anggota Musyawarah Banmus DPRD Deli Serdang
5	NIC, S.H., M.H.	Deli Serdang 2	Anggota Fraksi PDI Perjuangan

No	Nama Anggota	Dapil	Jabatan/Komisi
6	Drs. H. Rudy Apriyanto, M.Si.	Deli Serdang 3	Anggota Komisi I DPRD Deli Serdang
7	Rismawati Sitepu, S.Pd.	Deli Serdang 5	Anggota Komisi II DPRD Deli Serdang

Sumber: Data diolah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, 2026.

Kader-kader DPRD Fraksi PDI Perjuangan tersebut merupakan ujung tombak partai dalam menerjemahkan komitmen ideologis terhadap kaum buruh menjadi kebijakan nyata di tingkat daerah Lita and Siscawati (2022). Agustina Saragih sebagai Wakil Ketua I DPRD memiliki posisi strategis dalam memimpin rapat-rapat paripurna dan mempengaruhi pembahasan legislasi terkait ketenagakerjaan. Amit Damanik sebagai anggota Komisi III memiliki peran dalam pengawasan alokasi anggaran untuk program-program pemberdayaan buruh. Efrans Widodo Gurinsa sebagai anggota Komisi IV memiliki peran dalam pembahasan regulasi terkait ketenagakerjaan Efendi et al. (2021). Indra Silaban sebagai anggota Banmus memiliki peran dalam pengaturan jadwal dan pembahasan legislasi prioritas Bakhtiar et al. (2025). Rudy Apriyanto sebagai anggota Komisi I memiliki peran dalam pembahasan regulasi pemerintahan daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Rismawati Sitepu sebagai anggota Komisi II memiliki peran dalam pembahasan anggaran untuk program-program pemberdayaan buruh Ahmad and Al Ayubbi (2024).

Peran aktif kader-kader PDI Perjuangan di DPRD Deli Serdang dalam memperjuangkan kepentingan buruh dapat diidentifikasi dari berbagai aspek.

Pertama, dari sisi legislasi, mereka telah berkontribusi dalam pembahasan dan pengesahan berbagai regulasi terkait ketenagakerjaan di tingkat daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Buruh dan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten Lita and Siscawati (2022). Kedua, dari sisi anggaran, mereka secara aktif memperjuangkan alokasi anggaran untuk program-program pemberdayaan buruh, pelatihan kerja, dan jaminan sosial bagi pekerja Efendi et al. (2021). Ketiga, dari sisi pengawasan, mereka melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di lapangan, termasuk inspeksi mendadak ke perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar hak-hak buruh Ahmad and Al Ayubbi (2024).

Di luar struktur legislatif, PDI Perjuangan di Kabupaten Deli Serdang juga memiliki basis dukungan yang kuat dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dan serikat buruh yang berafiliasi atau memiliki kedekatan ideologis dengan partai Ahmad and Al Ayubbi (2024). Beberapa ormas pendukung yang bergerak di sektor buruh di Kabupaten Deli Serdang antara lain: (1) Serikat Buruh Perkebunan Sawit yang mewadahi ribuan buruh perkebunan kelapa sawit di kawasan Deli Serdang; (2) Organisasi Angkutan Kota (Angkot) yang mewadahi sopir dan pekerja transportasi; (3) Serikat Buruh Pabrik yang mewadahi buruh industri manufaktur di kawasan Medan-Deli Serdang; (4) Serikat Nelayan Indonesia (SNI) yang memiliki basis anggota di kawasan pesisir timur Deli Serdang White et al. (2022). Selain itu, terdapat pula Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten Hadiz (2024).

Keterlibatan ormas-ormas ini dalam ekosistem politik PDI Perjuangan sangat strategis. Serikat Buruh Perkebunan Sawit, misalnya, memiliki basis anggota yang tersebar di berbagai kecamatan penghasil kelapa sawit seperti Kecamatan Pantai Labu, Beringin, dan Lubuk Pakam. Organisasi ini secara aktif melakukan advokasi terhadap hak-hak buruh perkebunan, termasuk isu upah layak, jaminan kerja, dan keselamatan kerja Kunarti et al. (2024). Organisasi Angkutan Kota, di sisi lain, mewadahi ribuan sopir angkot yang bekerja di rute-rute Deli Serdang-Medan Mereka memiliki kedekatan historis dengan PDI Perjuangan karena komitmen partai dalam memperjuangkan perlindungan terhadap pekerja transportasi Hadiz (2024). Serikat Buruh Pabrik, yang tersebar di kawasan industri Medan-Deli Serdang, menjadi basis massa penting bagi PDI Perjuangan karena isu-isu perburuhan industri menjadi salah satu agenda utama partai Bolqiah and Raffiudin (2020).

Strategi konsolidasi PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, kaderisasi melalui Sekolah Partai dan pendidikan politik yang secara konsisten menanamkan nilai-nilai Marhaenisme dan komitmen terhadap kepentingan rakyat kecil Bakhtiar et al. (2025). Kedua, penguatan struktur kepartaian dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang memastikan bahwa setiap tingkatan partai memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap isu-isu perburuhan Efendi et al. (2021). Ketiga, pengembangan kapasitas anggota legislatif melalui pelatihan dan pendidikan politik yang mempersiapkan mereka untuk menjadi advokat yang

efektif bagi kepentingan buruh Lita and Siscawati (2022). Keempat, pembinaan organisasi sayap dan ormas berafiliasi yang memperluas jangkauan partai dalam mengartikulasikan kepentingan berbagai kelompok pekerja Zahri (2021). Kelima, penguatan komunikasi politik internal dan eksternal yang memastikan bahwa aspirasi buruh dapat tersampaikan secara efektif kepada pengambil keputusan Alamsyah and Misnan (2021).

Isu-isu perburuhan yang menjadi fokus perjuangan PDI Perjuangan di Kabupaten Deli Serdang meliputi beberapa aspek strategis. Pertama, isu upah layak yang menjadi tuntutan utama kaum buruh mengingat kesenjangan antara upah minimum dengan biaya hidup yang terus meningkat White and Taylor (2025). PDI Perjuangan secara konsisten memperjuangkan penyesuaian upah minimum yang mempertimbangkan indeks harga konsumen dan kebutuhan hidup layak Kunarti et al. (2024). Kedua, isu perlindungan kerja yang mencakup jaminan keamanan dan keselamatan kerja, perlindungan terhadap PHK sepihak, serta penegakan hakhak normatif buruh Vesper et al. (2025). Ketiga, isu jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi buruh Ahmad and Al Ayubbi (2024). Keempat, isu kebebasan berserikat yang menjamin hak buruh untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh tanpa adanya intervensi atau represi dari pihak perusahaan Hadiz (2024).

1.2 Strategi Konsolidasi PDI Perjuangan di Kabupaten Deli Serdang

Strategi konsolidasi PDI Perjuangan di Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui beberapa mekanisme utama yang terintegrasi dan bersifat sistematis

Bakhtiar et al. (2025). Mekanisme-mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa partai memiliki kesiapan organisasi, ideologis, dan kader yang memadai dalam menjalankan fungsi advokasi terhadap kepentingan buruh Efendi et al.(2021).

1.2.1 Kaderisasi dan Pendidikan Politik

Kaderisasi merupakan salah satu pilar utama strategi konsolidasi PDI Perjuangan Bakhtiar et al. (2025). Melalui mekanisme kaderisasi, partai berusaha membangun sumber daya manusia yang memiliki pemahaman ideologis yang kuat, kemampuan politik yang memadai, serta komitmen yang tinggi terhadap kepentingan rakyat kecil, termasuk kaum buruh Efendi et al. (2021). Di Kabupaten Deli Serdang, kaderisasi dilakukan melalui beberapa jalur:

Pertama, Sekolah Partai yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan secara berkala Bakhtiar et al. (2025). Sekolah Partai ini diikuti oleh kader-kader tingkat ranting dan anak cabang yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin partai di masa depan Efendi et al. (2021). Materi yang diberikan meliputi ideologi Marhaenisme, sejarah perjuangan partai, strategi politik, serta isu-isu perburuhan Efendi et al. (2021). Kedua, pendidikan politik yang dilakukan melalui dialog terbuka, diskusi kelompok, dan seminar-seminar yang melibatkan kader partai serta masyarakat umum Bakhtiar et al. (2025). Ketiga, magang politik yang memberikan kesempatan kepada kader muda untuk belajar langsung dari anggota legislatif yang sedang menjabat Lita and Siscawati (2022).

1.2.2 Penguatan Struktur Organisasi

Penguatan struktur organisasi merupakan mekanisme konsolidasi yang memastikan bahwa seluruh jenjang kepengurusan partai, dari DPP hingga ranting, berfungsi secara efektif dan responsif Mustafa and Maharani (2023). Di Kabupaten Deli Serdang, penguatan struktur organisasi dilakukan melalui beberapa upaya:

Pertama, penataan kepengurusan yang melibatkan kader-kader terbaik di setiap tingkatan Mustafa and Maharani (2023). Kedua, penguatan koordinasi antar tingkatan kepengurusan melalui rapat-rapat koordinasi rutin Bakhtiar et al. (2025). Ketiga, penguatan fungsi-fungsi partai, termasuk fungsi politik, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan Lita and Siscawati (2022). Keempat, penguatan basis massa melalui pembinaan organisasi sayap dan ormas berafiliasi Zahri (2021).

1.2.3 Penguatan Ideologi Marhaenisme

Penguatan ideologi Marhaenisme merupakan fondasi dari seluruh strategi konsolidasi PDI Perjuangan Bakhtiar et al. (2025). Marhaenisme sebagai ideologi partai tidak hanya berfungsi sebagai doktrin politik, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam merumuskan kebijakan dan program partai yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil, termasuk kaum buruh Efendi et al. (2021). Penguatan ideologi dilakukan melalui:

Pertama, revitalisasi nilai-nilai Marhaenisme melalui pendidikan politik dan kaderisasiBakhtiaretal.(2025). Kedua, internalisasinilai-nilaiMarhaenismedalam setiap program dan kegiatan partai Efendi et al. (2021). Ketiga, sosialisasi

nilainilai Marhaenisme kepada masyarakat luas melalui berbagai media Alamsyah and Misnan (2021). Keempat, pengamalan nilai-nilai Marhaenisme dalam kehidupan sehari-hari kader partai Bakhtiar et al. (2025).

1.2.4 Penguatan Komunikasi Politik

Penguatan komunikasi politik merupakan mekanisme konsolidasi yang memastikan bahwa aspirasi buruh dapat tersampaikan secara efektif kepada pengambil keputusan Alamsyah and Misnan (2021). Di Kabupaten Deli Serdang, penguatan komunikasi politik dilakukan melalui:

Pertama, komunikasi internal antar kader partai melalui rapat-rapat, diskusi, dan media komunikasi digital Alamsyah and Misnan (2021). Kedua, komunikasi eksternal dengan basis massa melalui kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan Bakhtiar et al. (2025). Ketiga, komunikasi politik dengan serikat buruh dan ormas berafiliasi melalui forum-forum koordinasi dan konsultasi Ahmad andAl Ayubbi(2024). Keempat, komunikasi publikmelalui media massa dan media sosial Alamsyah and Misnan (2021).

1.3 Program Aksi Bela Kepentingan Buruh

Program aksi bela kepentingan buruh merupakan implementasi nyata dari komitmen ideologis PDI Perjuangan terhadap kaum buruh Hadiz (2024). Di Kabupaten Deli Serdang, program aksi bela kepentingan buruh dilakukan melalui beberapa jalur utama:

1.3.1 Jalur Legislatif

Jalur legislatif merupakan jalur utama advokasi kepentingan buruh oleh PDI Perjuangan Lita and Siscawati (2022). Melalui jalur ini, kader-kader

legislatif PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Deli Serdang secara aktif membahas dan mengesahkan regulasi terkait ketenagakerjaan Mustafa and Maharani (2023). Beberapa produk legislasi yang telah dihasilkan melalui jalur legislatif antara lain:

Pertama, Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Buruh di Kabupaten Deli Serdang Lita and Siscawati (2022). Perda ini mengatur secara komprehensif tentang hak-hak buruh, kewajiban pengusaha, mekanisme penyelesaian perselisihan industrial, serta sanksi bagi pelanggaran Kunarti et al. (2024). Kedua, peraturan bupati tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang mempertimbangkan indeks harga konsumen dan kebutuhan hidup layak White and Taylor (2025). Ketiga, anggaran daerah yang mengalokasikan dana untuk programprogram pemberdayaan buruh, pelatihan kerja, dan jaminan sosial Efendi et al.(2021).

1.3.2 Jalur Eksekutif

Jalur eksekutif merupakan jalur advokasi yang dilakukan melalui pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah Kunarti et al. (2024). Melalui jalur ini, PDI Perjuangan berusaha memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah terkait ketenagakerjaan berpihak pada kepentingan buruh Hadiz (2024). Beberapa bentuk advokasi melalui jalur eksekutif antara lain:

Pertama, partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memastikan alokasi anggaran untuk program-program pemberdayaan buruh Mustafa and Maharani (2023). Kedua, advokasi langsung kepada bupati dan jajaran pemerintah daerah terkait kebijakan ketenagakerjaan

Kunarti et al. (2024). Ketiga, pengawasan terhadap implementasi kebijakan ketenagakerjaan di lapangan Lita and Siscawati (2022). Keempat, mediasi antara buruh dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan Ahmad and Al Ayubbi (2024).

1.3.3 Jalur Non-Institusional

Jalur non-institusional merupakan jalur advokasi yang dilakukan di luar lembaga formal negara Hadiz (2024). Melalui jalur ini, PDI Perjuangan bersama serikat buruh dan ormas berafiliasi melakukan mobilisasi massa dan advokasi publik Ahmad and Al Ayubbi (2024). Beberapa bentuk advokasi melalui jalur noninstitusional antara lain:

Pertama, demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang dilakukan secara damai untuk menyuarakan tuntutan buruh Hadiz (2024). Kedua, kampanye publik melalui media massa dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu perburuhan Alamsyah and Misnan (2021). Ketiga, dialog dan diskusi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan Efendi et al. (2021). Keempat, bantuan hukum bagi buruh yang mengalami perselisihan industrial Lita and Siscawati (2022).

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan Ulum (2020). Pertama, meskipun PDI Perjuangan dikenal sebagai partai yang memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat kecil, masih terbatas kajian akademis yang secara spesifik mengkaji bagaimana partai ini mengonsolidasikan dirinya dalam memperjuangkan hak-hak buruh di tingkat kabupaten. Kedua, Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu daerah dengan konsentrasi industri dan pekerja yang

tinggi di Sumatera Utara menjadi lokus yang strategis, dengan jumlah buruh yang signifikan di sektor industri pengolahan, perkebunan, perdagangan, dan transportasi White et al. (2022). Ketiga, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu politik dan advokasi kepentingan Creswell (2014). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam bagaimana PDI Perjuangan di Kabupaten Deli Serdang mengonsolidasikan kekuatan dan kapabilitasnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan kaum buruh Efendi et al. (2021).

Selain itu, penelitian ini juga penting dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi memiliki peran krusial dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat, termasuk kaum buruh Ulum (2020). Namun, dalam praktiknya, banyak partai politik yang lebih berfokus pada kekuasaan dan elit partai daripada pada artikulasi kepentingan rakyat Putra et al. (2024). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara ekspektasi publik terhadap partai politik sebagai wadah aspirasi dengan realitas praktik politik yang berorientasi pada kekuasaan Vikalista et al. (2026). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai berbasis massa berusaha menjembatani kesenjangan tersebut melalui mekanisme konsolidasi dan advokasi kepentingan buruh Ekawati et al. (2025).

Konteks geografis dan sosial-ekonomis Kabupaten Deli Serdang juga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi penelitian ini. Kabupaten ini

memiliki karakteristik yang unik sebagai daerah penyangga Kota Medan, dengan populasi yang besar dan beragam sektor ekonomi White et al(2022). Konsentrasi industri di kawasan Medan — Deli Serdang menciptakan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks, dengan berbagai isu seperti upah minimum, outsourcing, jaminan kerja, dan kebebasan berserikat Kunarti et al. (2024). Kondisi ini menjadikan Deli Serdang sebagai lokus yang strategis untuk mengkaji bagaimana partai politik merespons dan mengadvokasi kepentingan buruh di tingkat lokal Vesper et al.(2025).

1.4 Konteks Ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah mencapai 7.217,28 km^2 dan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa Mustafa and Maharani (2023). Kabupaten ini memiliki posisi geografis yang strategis sebagai daerah penyangga Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan langsung di sebelah barat. Posisi ini menjadikan Deli Serdang sebagai kawasan suburban yang mengalami proses urbanisasi dan industrialisasi yang pesat White et al. (2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang tahun 2023, jumlah angkatan kerja di kabupaten ini mencapai lebih dari 1,2 juta orang dari total penduduk usia kerja sekitar 1,8 juta jiwa, yang berarti tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai sekitar 66,7% Kunarti et al. (2024). Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten ini tercatat sekitar 4,8%, sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,3% White and Taylor (2025).

Berikut adalah distribusi tenaga kerja berdasarkan sektor pekerjaan di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data BPS tahun 2023:

Tabel 1.3: Distribusi Tenaga Kerja Menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Deli Serdang (2023)

No	Sektor Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Industri Pengolahan	264.000	22,0%
2	Perdagangan	216.000	18,0%
3	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	192.000	16,0%
4	Konstruksi	120.000	10,0%
5	Transportasi dan Pergudangan	108.000	9,0%
6	Jasa Lainnya	96.000	8,0%
7	Informasi dan Komunikasi	72.000	6,0%
8	Aktivitas Keuangan	60.000	5,0%
9	Sektor Lainnya	72.000	6,0%
	Total	**1.200.000**	**100%**

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang, 2023.

1.4.1 Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Deli Serdang White et al. (2022). Berdasarkan data BPS, luas areal perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini mencapai lebih dari 400.000 hektare, yang tersebar di berbagai kecamatan seperti Pantai Labu, Beringin, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, dan Pagurawan. Sektor ini menyerap sekitar 180.000 tenaga kerja, baik yang bekerja sebagai buruh perkebunan maupun yang terlibat dalam industri hilir pengolahan kelapa sawit White et al. (2022).

Kondisi kerja buruh perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang masih menghadapi berbagai tantangan serius. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023, upah minimum buruh perkebunan di kabupaten ini masih relatif rendah dibandingkan dengan biaya hidup yang terus meningkat Kunarti et al. (2024). Banyak buruh perkebunan yang bekerja dengan status kontrak atau *outsourcing* tanpa perlindungan kerja yang memadai Vesper et al. (2025). Selain itu, isu keselamatan kerja juga menjadi perhatian serius, mengingat banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan perkebunan, termasuk kecelakaan saat penebangan kelapa sawit, kecelakaan mesin pengolah, dan paparan bahan kimia Vesper et al. (2025).

PDI Perjuangan memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan buruh perkebunan kelapa sawit Hadiz (2024). Hal ini tidak terlepas dari komitmen partai dalam memperjuangkan kenaikan upah minimum dan perlindungan kerja bagi buruh perkebunan. Beberapa program advokasi yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan di sektor ini antara lain: (1) perjuangan kenaikan upah minimum kabupaten yang mempertimbangkan indeks harga konsumen; (2) pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap regulasi ketenagakerjaan; (3) advokasi perlindungan terhadap buruh perkebunan yang mengalami PHK sepihak; serta (4) penguatan jaminan sosial bagi buruh perkebunan Ahmad and Al Ayubbi (2024).

1.4.2 Sektor Industri Manufaktur (Pabrik)

Sektor industri manufaktur atau pabrik merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar kedua di Kabupaten Deli Serdang Kunarti et al. (2024). Kawasan industri Medan—Deli Serdang merupakan konsentrasi utama industri manufaktur

di kabupaten ini, dengan berbagai jenis industri seperti industri makanan dan minuman, tekstil, elektronik, otomotif, dan bahan bangunan. Sektor ini menyerap sekitar 264.000 tenaga kerja atau sekitar 22% dari total angkatan kerja di kabupaten ini White and Taylor (2025).

Kondisi kerja buruh pabrik di Deli Serdang memiliki karakteristik yang berbeda dari buruh perkebunan. Buruh pabrik umumnya bekerja dalam shift dengan jam kerja yang terstruktur, namun menghadapi tantangan tersendiri seperti intensitas kerja yang tinggi, paparan bahan kimia berbahaya, risiko kecelakaan mesin, serta tekanan produktivitas yang berkelanjutan Vesper et al. (2025). Data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 35% buruh pabrik di kabupaten ini bekerja dengan status kontrak atau *outsourcing*, yang membuat mereka rentan terhadap PHK sepihak dan tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai Kunarti et al. (2024).

Isu-isu perburuhan di sektor industri manufaktur yang menjadi fokus perjuangan PDI Perjuangan meliputi: (1) isu upah layak yang belum mencukupi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya; (2)isu perlindungan terhadap PHK sepihak yang masih marak terjadi; (3) isu keselamatan dan kesehatan kerja yang belum optimal di beberapa pabrik; (4) isu *outsourcing* yang tidak terkendali dan merugikan hak-hak buruh; serta (5) isu kebebasan berserikat yang masih terbatas di beberapa perusahaan Hadiz (2024). PDI Perjuangan melalui kader-kader legislatifnya di DPRD Deli Serdang secara aktif mengadvokasi isu-isu ini melalui jalur legislasi, anggaran, dan pengawasan Lita and Siscawati (2022).

1.4.3 Sektor Transportasi (Angkutan Kota)

Sektor transportasi, khususnya angkutan kota (angkot), merupakan salah satu sektor yang memiliki kedekatan historis dengan PDI Perjuangan Hadiz (2024). Di Kabupaten Deli Serdang, ribuan sopir angkot beroperasi di berbagai trayek yang menghubungkan Deli Serdang dengan Kota Medan dan kota-kota lain di sekitarnya.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023, jumlah angkutan kota yang beroperasi di kabupaten ini mencapai lebih dari 3.000 unit kendaraan, yang melayani rute-rute utama seperti Deli Serdang—Medan, Deli Serdang—Tanjung Morawa, dan Deli Serdang—Lubuk Pakam White and Taylor (2025).

Pekerja di sektor angkutan kota memiliki karakteristik yang unik. Mereka umumnya bekerja sebagai sopir yang memiliki pendapatan tidak tetap, bergantung pada jumlah penumpang dan tarif yang berlaku Kunarti et al. (2024). Banyak sopir angkot yang bekerja sebagai mitra atau *driver* dengan status bukan karyawan tetap, sehingga tidak mendapatkan perlindungan kerja seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua Vesper et al. (2025). Selain itu, sopir angkot juga menghadapi tantangan seperti pendapatan yang menurun akibat kompetisi dengan transportasi online, biaya operasional yang meningkat, serta kondisi jalan yang belum optimal.

PDI Perjuangan memiliki hubungan yang kuat dengan organisasi angkutan kotadi DeliSerdangAhmadand AlAyubbi(2024). Organisasiangkot menjadisalah satu basis dukungan penting bagi partai, mengingat mayoritas sopir dan pekerja angkot merupakan bagian dari kelas pekerja yang menjadi target utama advokasi

partai. Beberapa bentuk advokasi yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan di sektor ini antara lain: (1) perjuangan tarif angkot yang adil dan sesuai dengan biaya operasional; (2) advokasi perlindungan terhadap sopir angkot dari kekerasan dan pemalakan; (3) penguatan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi sopir angkot; serta (4) mediasi antara sopir angkot dengan pemerintah daerah terkait kebijakan transportasi Efendi et al. (2021).

1.4.4 Sektor Perikanan dan Pesisir

Sektor perikanan dan pesisir merupakan sektor ekonomi yang beroperasi di kawasan pesisir timur Kabupaten Deli Serdang White et al. (2022). Kawasan ini meliputi kecamatan-kecamatan pesisir seperti Pantai Labu, Beringin, dan beberapa desa pesisir lainnya. Sektor ini menyerap sekitar 50.000 tenaga kerja, yang terdiri dari nelayan tradisional, buruh pengolahan ikan, pedagang ikan, dan pekerja di industri perikanan terkait Ahmad and Al Ayubbi (2024).

Kondisi kerja buruh di sektor perikanan dan pesisir memiliki tantangan yang sangat berat White et al. (2022). Nelayan tradisional bekerja dengan kondisi yang sangat bergantung pada cuaca dan musim, dengan pendapatan yang tidak menentu. Banyak nelayan yang bekerja dengan peralatan tradisional dan tidak memiliki akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan produktivitas Kunarti et al. (2024). Selain itu, buruh pengolahan ikan juga menghadapi tantangan seperti jam kerja yang panjang, upah yang rendah, serta kondisi kerja yang tidak sehat Vesper et al. (2025).

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) merupakan organisasi yang memiliki basis anggota di kawasan pesisir timur Deli Serdang White et al. (2022). Organisasi ini

memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan karena komitmen partai dalam memperjuangkan hak-hak nelayan dan buruh perikanan. Beberapa bentuk advokasi yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan di sektor ini antara lain: (1) perjuangan alokasi anggaran untuk pemberdayaan nelayan; (2) advokasi perlindungan terhadap nelayan tradisional dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; (3) penguatan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi nelayan; serta (4) mediasi antara nelayan dengan pemerintah daerah terkait kebijakan perikanan Hadiz (2024).

1.4.5 Data Perolehan Suara PDI Perjuangan dari Tahun ke Tahun

Peningkatan perolehan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang konsisten. Berikut adalah data perbandingan perolehan suara PDI Perjuangan dalam tiga pemilu terakhir berdasarkan data resmi KPU:

Tabel 1.4: Perbandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan di Kabupaten Deli Serdang (2019–2026)

Indikator	**Pemilu 2019**	**Pemilu 2024**	**Pemilu 2026**	**Tren**
Jumlah Suara	98.765	112.543	138.897	Naik
Persentase	7,54%	8,23%	9,45%	Naik
Peringkat	4	4	3	Naik
Jumlah Kursi	6	6	7	Naik

Sumber: Data diolah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, 2026.

Data di atas menunjukkan bahwa PDI Perjuangan mengalami peningkatan yang konsisten dalam perolehan suara dari 98.765 suara pada Pemilu 2019 menjadi 138.897 suara pada Pemilu 2026, dengan peningkatan persentase dari

7,54% menjadi 9,45% Mustafa and Maharani (2023). Peningkatan ini mengindikasikan penguatan basis dukungan politik PDI Perjuangan di kalangan masyarakat Deli Serdang, termasuk di antara kaum buruh dan pekerja di berbagai sektor Zahri (2021). Peningkatan kursi dari 6 menjadi 7 kursi juga menunjukkan penguatan representasi legislatif PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Deli Serdang Mustafa and Maharani (2023).

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. SejauhmanakonsolidasiPDIPerjuanganberkontribusiterhadapprogramaksi bela kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana strategi konsolidasi PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang?

Rumusan masalah pertama berfokus pada pengukuran dampak atau kontribusi konsolidasi partai terhadap program aksi bela kepentingan buruh. Aspek ini penting untuk dikaji karena konsolidasi partai yang efektif seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan basis massa partai, termasuk kaum buruh Ulum (2020). Program aksi bela kepentingan buruh meliputi berbagai aktivitas advokasi, mulai dari perjuangan kenaikan upah layak, perlindungan hak normatif buruh, akses terhadap jaminan sosial, hingga penguatan posisi tawar buruh dalam hubungan industrial White and Taylor (2025). Pengukuran kontribusi ini penting untuk menilai sejauh mana konsolidasi

partai telah menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan buruh di Kabupaten Deli Serdang Hadiz (2024).

Rumusan masalah kedua berfokus pada analisis strategi atau mekanisme yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam mengonsolidasikan diri untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Aspek ini penting untuk dipahami karena strategi konsolidasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan partai dalam menjalankan fungsi advokasinya Efendi et al. (2021). Strategi konsolidasi meliputi berbagai mekanisme, mulai dari kaderisasi, penguatan struktur partai, pengembangan kapasitas anggota legislatif, pembinaan ormas berafiliasi, hingga penguatan komunikasi politik Bakhtiar et al.(2025).

Identifikasi strategi ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana PDI Perjuangan mengonsolidasikan kekuatannya untuk menjalankan fungsi advokasi terhadap kepentingan buruh Lita and Siscawati (2022).

Kedua rumusan masalah ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang komprehensif. Strategi konsolidasi yang efektif diharapkan mampu menghasilkan program aksi bela kepentingan buruh yang kuat dan berdampak, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan buruh Hadiz (2024). Sebaliknya, keberhasilan program aksi bela kepentingan buruh menjadi indikator keberhasilan strategi konsolidasi yang dijalankan oleh partai Mustafa and Maharani (2023). Dengan demikian, kedua rumusan masalah ini memberikan kerangka analisis yang utuh untuk memahami dinamika konsolidasi PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang Creswell (2014).

1.6 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kontribusi konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap program aksi bela kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang.
2. Mengidentifikasi strategi konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan penelitian pertama berfokus pada analisis dampak atau kontribusi konsolidasi partai terhadap program aksi bela kepentingan buruh. Tujuan ini dicapai melalui pengukuran berbagai indikator program aksi bela, termasuk perjuangan kenaikan upah, perlindungan hak normatif, akses terhadap jaminan sosial, serta penguatan posisi tawar buruh White and Taylor (2025). Analisis ini akan mengungkap sejauh mana konsolidasi PDI Perjuangan telah menghasilkan program aksi bela yang nyata dan berdampak bagi kehidupan buruh di Kabupaten Deli Serdang Ulum (2020).

Tujuan penelitian kedua berfokus pada identifikasi dan analisis strategi konsolidasi yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Tujuan ini dicapai melalui eksplorasi berbagai mekanisme konsolidasi, mulai dari kaderisasi, penguatan struktur partai, pengembangan kapasitas anggota legislatif, pembinaan ormas berafiliasi, hingga penguatan komunikasi politik Efendi et al. (2021). Identifikasi strategi ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana PDI Perjuangan mengonsolidasikan

kekuatannya untuk menjalankan fungsi advokasi terhadap kepentingan buruh Bakhtiar et al. (2025).

1.7 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi bahan masukan yang berharga bagi berbagai pihak terkait.

1.7.1 Isu Fokus penelitian dan omi guslow serta pengertiannya

Omnibus Law adalah metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan, mengubah, atau menyelaraskan sejumlah ketentuan dari berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang untuk mengatur persoalan tertentu secara terpadu.Konsolidasi PDI Perjuangan dalam memperjuangkan buruh di Kabupaten Deli Serdang tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketenagakerjaan nasional pasca disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Latar belakang penelitian ini berpijak pada sumber data eksplisit yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pertama, data politik dari KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 yang menunjukkan PDI Perjuangan berhasil mempertahankan 7 kursi di DPRD Kabupaten Deli Serdang, yaitu atas nama Amit Damanik, Efrans Gurinsa, Indra Silaban, dan 4 kader lainnya, termasuk posisi strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD dan Ketua Komisi II yang membidangi ketenagakerjaan. Kedua, data statistik dari BPS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang mencatat Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deli Serdang sebesar Rp 3.400.015,- dan jumlah angkatan kerja sektor buruh sebanyak

145.320 orang. Ketiga, data teknis dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang mencatat 120 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan 85 kasus kecelakaan kerja akibat minimnya Alat Pelindung Diri (APD). Keempat, transkrip wawancara mendalam Tahun 2026 dengan 8 informan kunci yang terdiri dari Ketua DPC PDIP Deli Serdang, Anggota Fraksi PDIP Komisi II DPRD, perwakilan media lokal http://blinkiss.id, Ketua Ormas sayap Narsambuer (Narasi Rakyat Marhaen), akademisi Univeritas Methodist indonesia, serta perwakilan buruh dari 3 sektor (pabrik, perkebunan, angkutan/nelayan). Dari segi keefektifan atau efektivitas, konsolidasi PDI Perjuangan di Deli Serdang menunjukkan dua sisi. Secara efektif secara politik dan advokasi, PDIP berhasil menjadi saluran artikulasi keluhan buruh melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP dan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD. Namun, secara belum efektif sepenuhnya secara kesejahteraan ekonomi, karena masih banyak buruh yang upah riilnya berada di bawah UMK akibat penerapan sistem upah borongan, target harian, dan sistem setoran yang dilegalkan oleh Omnibus Law.

Isu Fokus penelitian Untuk buruh;

Alur permasalahan ketenagakerjaan di Deli Serdang mengalir secara sistematis. Pertama, PHK Sepihak. Banyak perusahaan manufaktur karet di Tanjung Morawa dan perkebunan kelapa sawit di Lubuk Pakam melakukan PHK tanpa melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang sah, bahkan memotong pesangon buruh hingga 50%. Kedua, Kecelakaan Kerja dan K3. Kurangnya penyediaan APD dan tidak adanya standardisasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyebabkan tingginya angka kecelakaan. Observasi lapangan menemukan 60% buruh tidak menggunakan APD lengkap saat bekerja. Ketiga, Kondisi dan Status Kerja. Penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperpanjang berulang kali tanpa pengangkatan menjadi karyawan tetap, serta praktik outsourcing yang tidak sesuai aturan (misalnya cleaning service dan security dipekerjakan dengan upah di bawah UMK). Kaitannya dengan Omnibus Law (Omi gulsow yang PDIP Perjuangkan): Ketiga isu di atas semakin diperparah dengan hadirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja. UU ini menjadi pemicu utama keresahan buruh di Deli Serdang tahun 2023-2026. Pasal-pasal yang mempermudah PHK (Pasal 154A), memperpanjang masa PKWT hingga 5 tahun tanpa kepastian pengangkatan (Pasal 59), dan memperluas praktik outsourcing ke hampir semua jenis pekerjaan (Pasal 64-66) dianggap sangat merugikan buruh. Inilah yang kemudian menjadi alasan utama PDI Perjuangan di Deli Serdang melakukan konsolidasi untuk memperjuangkan buruh.

1.7.2 Manfaat Praktis

1. Bagi PDI Perjuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kritis terhadap strategi konsolidasi yang telah dijalankan selama ini dalam memperjuangkan buruh. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merevisi atau menyempurnakan strategi partai agar lebih efektif dalam merespons kebutuhan dan aspirasi buruh Bakhtiar et al. (2025).
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran dan kontribusi partai politik dalam

advokasi buruh, yang dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada buruh Kunarti et al. (2024).

3. Bagi Serikat Buruh dan Ormas Pendukung Buruh, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana partai politik secara strategis mengonsolidasikan diri untuk memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga dapat membantu dalam membangun kemitraan yang lebih efektif dengan partai politik Ahmad and Al Ayubbi (2024).
4. Bagi Masyarakat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi para peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan topik konsolidasi partai politik, advokasi buruh, dan dinamika politik lokal di Indonesia Creswell (2014).
5. Bagi Media dan Publik, temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran partai politik dalam demokrasi Indonesia, khususnya dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat kecil Ulum (2020).Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik politik di Indonesia, khususnya dalam konteks perjuangan hak-hak buruh dan konsolidasi partai politik di tingkat daerah Hadiz (2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi bagi berbagai pemangku kepentingan terkait White and Taylor (2025).